

Evaluasi Program Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Lingkup Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2020/2021

Journal of Instructional Development Research
e-ISSN: 2715 1603
2023, Vol. 3 (1), 37-42

Sahat T. Simorangkir (*)

Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

Abstract

This study was conducted to evaluate and analyze inclusion education programs in elementary schools in Mataram City. This study focuses on: 1). The purpose, goals, and needs of the community towards inclusive education, 2). Plans and strategies for inclusive education programs which include; Human resources, curriculum, and facilities at the Provincial Education Office, 3). program implementation; capacity building, technical assistance and program monitoring and 4) Inclusive school performance outcomes. This study used a mixed method; quantitative and qualitative approach. Quantitative data were collected through simple and qualitative questionnaires through FGDs, in-depth interviews, and observations. The data was analyzed using the CIPP approach to summarize and determine recommendations. Program evaluation criteria are divided into 4 criteria, namely: 1). Context, consisting of community goals and needs for inclusive education programs, 2). Input; plans and strategies of human resources, curriculum and school facilities, 3). Process; implementation of capacity building, technical assistance, and monitoring, 4). External; school performance.

Keywords: Pendidikan inklusif, sekolah inklusif, evaluasi program, CIPP.

How to Cite: Simorangkir, S.T. (2023). Evaluasi program pendidikan inklusif pada sekolah dasar di lingkup dinas pendidikan Kota Mataram tahun 2020/2021. *Journal of Instructional Development Research*, 13 (1): 37-42.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan perubahan yang terjadi akhir-akhir menunjukkan situasi yang sangat signifikan. Berbagai macam perubahan yang ada tak pelak merubah perkembangan kehidupan, baik itu sosial kemasyarakatan bahkan sampai pendidikan. Pergeseran tren yang terjadi di tengah masyarakat ikut mempengaruhi siklus kualitas manusia yang lahir, tumbuh dan berkembang. Kemajuan yang terjadi membuat sebagian besar sumber daya manusia yang ada bertambah baik perkembangannya. Namun, disisi yang lain masih dijumpai kelahiran dengan bawaan disabilitas yang mengalami kesusahan dalam mengembangkan dirinya (Yusnaini, et al., 2018). Kenaikan jumlah anak dengan disabilitas terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir. Semakin banyak anak yang terlahir dalam keadaan cacat maupun mengalami perkembangan pertumbuhan yang tidak normal baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional (Rosalina, et al., 2020). WHO memperkirakan jumlah anak dengan disabilitas hingga tahun 2021 menunjukkan 17% dari jumlah populasi Indonesia.

Sementara itu disatu sisi jumlah sekolah yang selama ini dapat melayani anak dengan disabilitas yang lebih dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat terbatas jumlahnya. Disisi lain, dalam UU pendidikan maupun berbagai kebijakan pemerintah secara jelas menggarisbawahi mengenai hak seluruh anak tanpa terkecuali mengesap dunia pendidikan. Untuk mengisi kesenjangan hal ini maka sangatlah wajar bila pemerintah baik pusat maupun daerah memperluas peran sekolah umum yang lebih banyak tersebar dan berada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut dinamakan sebagai program pendidikan inklusif.

Pada beberapa tahun terakhir ini, pendidikan inklusif menjadi bagian dari isu nasional yang menarik untuk diangkat dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional. Hal ini tidak terlepas dari

semakin bertambahnya jumlah anak yang menderita disabilitas namun kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan yang setara (Ita, 2019; Al Khahim, et al., 2017). Keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang masih sangat terbatas tersebut seolah-olah menjadi satu-satunya wadah tempat para disabilitas tersebut mengenyam pendidikan. Yang pada akhirnya sebagian anak tersebut belum mampu mendapatkan suasana belajar yang optimal.

Pendidikan inklusif pada prinsipnya merupakan sebuah perkembangan dari sekolah terpadu yang selama ini dikenal. Hal ini tentu merupakan paradigma baru dengan adanya perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur, serta strategi yang berlaku sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi hak asasi manusia (Mozes, 2020).

Pada dunia pendidikan, inklusif dikenal sebagai bentuk pendidikan yang menitikberatkan pada persamaan dan kesetaraan, tanpa ada perebedaan perlakuan berdasarkan kemampuan dan kelainan yang terdapat pada tiap individu (Alhaddad, 2020). Sedangkan, Unesco (2005) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sekolah yang harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali pada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial emosional, bahasa atau kondisi lain termasuk penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Hal inilah yang disebut sebagai *one school for all*. Begitu juga Setiawan, et al (2019) memaknai pendidikan inklusif sebagai bentuk sekolah alternatif bagi anak dengan disabilitas, memberikan solusi dan akses pendidikan yang mampu dijangkau baik secara kompetensi maupun jarak tempuh sekolah oleh anak dengan disabilitas.

Sama halnya dengan pendapat Fernandes (2018) menyatakan bahwa, “Pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkebutuhan khusus ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas yang sama dengan siswa reguler”. Dapat diartikan bahwa keberadaan sekolah inklusif mampu menghadirkan kondisi dimana anak berkebutuhan khusus merasakan kesetaraan dalam hal pembelajaran. Hal ini menjadi penting agar sekolah tidak menciptakan kesenjangan yang bisa terjadi antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya (Wijaya, 2019). Dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Arum, et al., 2020). Dengan demikian potensi yang ada pada anak berkebutuhan khusus mampu dimaksimalkan dengan baik sehingga prestasi mampu juga diraih oleh anak berkebutuhan khusus (Rafikayati, et al., 2021).

Adapun evaluasi dibutuhkan dalam sebuah program agar diketahui program tersebut mampu berjalan dengan tepat sesuai perencanaan. Berdasarkan konsepnya, evaluasi program adalah sebuah proses menentukan/menilai (atau termasuk memutuskan didalamnya) atas manfaat atau nilai sebuah program. Keputusan atau penilaian ini dibuat melalui perbandingan bukti atau fakta-fakta program dengan kriteria apa dan seperti apa seharusnya program berjalan. Dalam Aryanti, et al (2018) bahwa evaluasi dimaknai sebagai sebagai salah satu alat dalam membantu sebuah perencanaan, perbaikan dan pengembangan serta penyempurnaan suatu kegiatan atau program. Selanjutnya Utami, et al (2019) menjelaskan evaluasi sebagai suatu cara dalam menilai sesuatu, yang dimana prosesnya dilakukan untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan sebuah keputusan terhadap objek yang dievaluasi. Jika dimaknai dengan lengkap, maka evaluasi program merupakan kegiatan investigasi ataupun asesmen yang sistematis terhadap suatu objek yang bernilai atau berharga (Muryadi, 2017).

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan khususnya di Kota Mataram merupakan daerah dengan jumlah anak dengan disabilitas yang masih tergolong tinggi. Dengan terbatasnya jumlah SLB di provinsi NTB khususnya di Kota Mataram dan tingginya jumlah anak dengan disabilitas, maka mendesak pemerintah provinsi NTB untuk segera melaksanakan program pendidikan inklusif tersebut secara optimal dan masif.

Pada program pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram, masih dijumpai beberapa kendala dan masalah-masalah terkait tercapainya program tersebut. Beberapa kendala yang dimaksud adalah masih terbatasnya data terkait jumlah anak disabilitas yang ada di sekolah binaan Dinas Kota Mataram.

Oleh karena itu, dokumen program pendidikan inklusif yang terdapat di Dinas Pendidikan Kota Mataram, dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan dibuat dalam rentang

5 tahun sekali. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh akurasi dalam hal evaluasi program yang diharapkan menjadi basis dalam perbaikan pada program selanjutnya.

Fokus yang diangkat dari penelitian ini adalah: 1). Tujuan, sasaran, dan kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan inklusi di Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2). Rencana dan strategi program pendidikan inklusi yang meliputi sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas di Dinas Pendidikan Kota Mataram, 3). Implementasi program pendidikan inklusi yang meliputi peningkatan keterampilan manajerial kepala sekolah, bimbingan teknis dan pengawasan layanan pendidikan inklusi di Dinas Pendidikan Kota Mataram dan 4). Hasil penilaian kinerja sekolah inklusi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Adapun peneliti menganalisa bahwa model evaluasi yang tepat untuk digunakan dalam fokus pendidikan inklusi adalah model evaluasi CIPP. Model ini dipilih karena memiliki kesesuaian dengan ciri dan syarat model dengan program yang akan dievaluasi yaitu bahwa pendidikan inklusi ditingkat dasar dan menengah merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat dinilai, program inklusi memenuhi syarat untuk dikelompokkan dalam program pemrosesan yaitu merupakan program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (*input*) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran (*output*), dan adanya sesuatu yang semula berada dalam kondisi awal sebagai masukan, kemudian diolah dan ditransformasi menjadi suatu keluaran yang dikehendaki oleh tujuan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis program demikian sangatlah tepat dan cocok digunakan untuk dievaluasi dengan menggunakan model CIPP.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Mataram pada periode 2020/2021 dengan wilayah Kota Mataram sebagai wilayah untuk melakukan konfirmasi dan mendapatkan gambaran utuh mengenai proses pelaksanaan program pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix-method* yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penyebaran angket, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, dan observasi dokumen dan lapangan menjadi cara data dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Konteks

Tujuan dan Sasaran Program Pendidikan Inklusif

Tujuan dan sasaran program pendidikan inklusif ditujukan bagi semua anak dengan berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan psikis di Kota Mataram yang harus mendapatkan akses pendidikan atau sekolah terdekat dari rumahnya dan berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan, hambatan, dan kebutuhannya. Kota Mataram memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan yang menunjuk beberapa sekolah untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif.

Ketersediaan data mengenai anak dengan disabilitas masih menjadi tantangan bagi program. Keterbatasan dan pemutakhiran data anak dengan disabilitas ini belum dapat menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan respon dari dinas pendidikan Kota Mataram. Meskipun data mengenai angka partisipasi anak bersekolah di sekolah umum dan sekolah luar biasa dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum atas kesenjangan tersebut namun belum dapat menggambarkan situasi riil yang terjadi. Data kualitatif menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pendidikan inklusif semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah anak disabilitas yang membutuhkan pendidikan. Akses terhadap sekolah bagi anak dengan disabilitas tidak selalu mudah, pada beberapa sekolah masih ditemukan prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan akses terhadap anak yang tidak mengalami disabilitas, kebijaksanaan pihak sekolah dan dinas pendidikan menjadi penentu kemudahan akses tersebut. Meskipun petunjuk teknis penerimaan siswa baru bagi anak

dengan disabilitas telah diatur lebih memudahkan bagi orang tua dan anak, tampaknya belum secara baik diketahui oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan Kota Mataram.

Meskipun akses terhadap pendidikan bagi anak dengan disabilitas masih belum terpenuhi secara baik, akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan masih beragam. Pada beberapa kasus, orang tua merasa sangat terbantu oleh pihak sekolah dalam hal pendidikan bagi anaknya, meskipun pada kasus lainnya, sebagai orang tua merasa tersingkirkan dari proses mendapatkan hak pendidikan bagi anak mereka. Dukungan masyarakat semakin meningkat terhadap layanan pendidikan inklusif ini, terbukti dengan terjalannya kerjasama dengan kader kelurahan maupun sesama orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas.

Deskripsi Input

Rencana Program Pendidikan Inklusif di Kota Mataram

Rencana program pendidikan inklusif tertuang dengan cukup jelas dalam dokumen program pendidikan inklusif. Perencanaan tersebut mencakup pada aspek: a). SDM, b). kurikulum, c). lingkungan dan fasilitas, d). keterlibatan orang tua dan masyarakat, e). pusat sumber sebagai sistem dukungan. Kelima aspek tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk program persiapan dan indikator keberhasilan. Dokumen program pendidikan inklusif berada dalam satu dokumen yang sama dengan program lainnya di bawah bidang pendidikan luar biasa (PLB) di Dinas Pendidikan Kota Mataram. Rencana program pendidikan inklusif ini secara rutin atau lima tahun sekali dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan situasi dan respon kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas. Dinas pendidikan juga melakukan evaluasi program setiap tengah tahun program dan akhir tahun program untuk digunakan sebagai masukan dalam pembuatan perencanaan program di tahun berikutnya.

Strategi Program Pendidikan Inklusif di Kota Mataram

Perencanaan SDM secara spesifik terkait pendidikan inklusif belum ada, belum tercantum rencana penguatan kapasitas tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti pada level pelaksanaan, terjadi kebingungan bagaimana rancangan peningkatan SDM dipahami hanya sebagai kegiatan sosialisasi saja tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik setiap tenaga kependidikan yang beragam yang berakibat pada kurang percaya dirinya guru dan kepala sekolah untuk menjalankan pengelolaan sekolah inklusif. Demikian pula untuk pembelian alat bantu ajar dan media pembelajaran. Kurangnya sosialisasi yang lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan pendidikan inklusif ini membuat pihak sekolah merasa takut untuk membelanjakan kebutuhan bagi anak dengan disabilitas. Pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran, pada sebagian besar sekolah MGMP melakukan kegiatan rutin yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk upaya peningkatan kapasitas guru melalui pengawas. Namun disayangkan, pembahasan mengenai pendidikan inklusif masih belum diangkat secara baik karena pengawas sekolah juga memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengenai pendidikan inklusif itu sendiri.

Deskripsi Proses

Implementasi Program Pendidikan Inklusif

Dalam hal peningkatan keterampilan kepala sekolah dirasakan masih memerlukan lebih dalam lagi pembekalan dari pihak dinas pendidikan terkait. Sampai pada tahap ini sebagian besar sekolah baru memahami tahap awal untuk mengubah cara pandang pendidikan dari eksklusif menjadi inklusif, namun belum sampai menjawab pada bagaimana kemudian anak dengan disabilitas dibantu dalam proses belajar mengajarnya. Hal ini terbukti bahwa kepala sekolah mengaku belum terlalu memahami secara utuh mengenai pengelolaan sekolah inklusif, dan dinyatakan bahwa pihak sekolah sangat membutuhkan pelatihan mengenai hal ini lebih detail dan bukan hanya teori tetapi juga praktek langsung. Akan tetapi sebagai tahap permulaan dalam upaya membuka akses seluas-luasnya bagi anak dengan disabilitas, kiranya hal ini cukup memberikan hasil yang positif. Pengawasan dan bimbingan teknis rutin mengenai pendidikan inklusif belum berjalan dengan terencana dan terjadwal. Hal ini dikarenakan baik pengawas

maupun dinas pendidikan Kota Mataram belum seluruhnya mengerti mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Deskripsi Produk

Kinerja guru diakui meningkat sejak sekolah melaksanakan pendidikan inklusif. Meskipun pihak sekolah tidak dapat menunjukkan hasil penilaian kinerja tersebut akan tetapi bagi kepala sekolah beberapa guru yang di dalam kelasnya terdapat anak dengan disabilitas terlihat lebih peduli kepada siswa dalam bekerja dibandingkan dengan guru yang tidak menangani anak dengan disabilitas.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data, kesimpulan penelitian ini adalah, **1) Deskripsi konteks**, diperoleh data sebagai berikut: a). Dokumen tujuan program disusun menurut tahun mulai dari tahun 2016 – 2021, b). Surat keputusan sekolah penyelenggara inklusif ada dan diperbaharui setiap dua tahun sekali, c). Angka estimasi anak dengan disabilitas di Kota Mataram dan data anak dengan disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler masih belum tersedia namun demikian terdapat data di tingkat provinsi yang masih memberikan gambaran mengenai kesenjangan ini, c). Akses sekolah tidak selalu mudah bagi anak dengan disabilitas, hal ini sangat tergantung pada kebijaksanaan pihak sekolah, d). Masyarakat menyambut baik penyelenggaraan pendidikan inklusif terutama bagi orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, tetapi tidak selalu demikian bagi orang tua lain yang tidak memiliki anak dengan disabilitas. **2). Deskripsi Input**, disimpulkan sebagai berikut: a). Rumusan tujuan tertuang dengan jelas yang mencakup aspek: SDM, kurikulum, lingkungan dan fasilitas, keterlibatan orang tua dan masyarakat dan pusat sumber, b). Baik pelatihan guru dan peningkatan kapasitas belum terjadwal dengan baik dan tersosialisasi sampai ke level sekolah, c). Dana untuk fasilitas sekolah masih terintegrasi dengan alokasi dana pada umumnya dalam sekolah dan dinas pendidikan Kota Mataram, d). Alat bantu ajar dapat menggunakan dana dari BOS tetapi pihak sekolah masih merasa takut membelanjakannya untuk anak dengan disabilitas dikarenakan alasan akuntabilitas, e). Asesment bagi anak dengan disabilitas dilakukan dengan keterbatasan keterampilan guru dan kepala sekolah, f). Diskusi rutin dengan MGMP berjalan konsisten namun bahasan tentang pendidikan inklusif masih dirasakan sangat minim, g). Menurut Dinas pendidikan, penilaian disesuaikan dengan kemampuan anak tetapi pihak sekolah kebingungan dengan hal ini. **3). Deskripsi Proses**, disimpulkan sebagai berikut: a). Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi namun bagi sekolah masih terasa sangat kurang dan membutuhkan pendalaman materi lebih lanjut, b). Pihak sekolah masih sangat membutuhkan pelatihan mengenai program pendidikan inklusif c). Sanksi administratif bagi sekolah yang menolak anak dengan disabilitas belum pernah digunakan untuk menegur sekolah yang melanggar selama ini, d). Pengawasan selalu mendadak dan tidak melibatkan pihak sekolah dalam perencanaannya, e). Sebagian kepala sekolah merasakan respon terhadap berbagai masalah dapat diberikan oleh dinas pendidikan secara tepat tetapi ada juga yang merasakan sebaliknya. **4). Deskripsi Produk** dapat disimpulkan Kinerja guru diakui meningkat sejak sekolah melaksanakan pendidikan inklusif. Meskipun pihak sekolah tidak dapat menunjukkan hasil penilaian kinerja tersebut akan tetapi bagi kepala sekolah beberapa guru yang di dalam kelasnya terdapat anak dengan disabilitas terlihat lebih peduli kepada siswa dalam bekerja dibandingkan dengan guru yang tidak menangani anak disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddad, M. R. (2020). Konsep pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. *Jurnal Raudhah*, 5(1), 21-30. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.57>
- Al Khakim, A., Prakosha, D., & Himawanto, D. A. (2017). Aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dalam lingkup pendidikan sekolah inklusi di Karisidenan Surakarta. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 16-18. <https://doi.org/10.21776/ub.IJDS.2017.004.01.3>

- Arum, S. K., Widyastono, H., & Sunardi, B. (2020). Pendidikan inklusi sebagai solusi pendidikan untuk semua (penerapan pendidikan inklusi di SDN Bromantakan 56 Surakarta). *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 3(1), 120-126. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/best/article/view/2487/1653>
- Aryanti, T., Supriyono, S., & Ishaq, I. (2018). Evaluasi program pendidikan dan pelatihan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 10(1), 1-13. <http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/3003/1816>
- Fernandes, R. (2018). Adaptasi sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119-125. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Ita, E. (2019). Konsep sistem layanan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186-195. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil/article/view/32/45>
- Mozes, N. Z. (2020). Hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1). <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538/522>
- Rafikayati, A., & Jauhari, M. N. (2021). Studi tentang pembelajaran vokasional bagi anak tunarungu di SMPN 28 Surabaya. *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)*, 2(1), 77-83. <https://doi.org/10.36456/special.vol2.no1.a3888>
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan sosial bagi orang dengan disabilitas netra dalam pencapaian prestasi di sekolah luar biasa. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 414-424. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28486/pdf>
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan inklusif: upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas (AdD). *Sosio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Unesco. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: United.
- Utami, W. Y. D., Jamaris, M., & Meilanie, S. M. (2019). Evaluasi program pengelolaan lembaga PAUD di Kabupaten Serang. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 67-76. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.259>
- Yusnaini, Y., & Slamet, S. (2019). Era revolusi industri 4.0: tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan literasi pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, (12)01, 1073-1085. Palembang: Universitas PGRI Palembang. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2668/2473>